



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : DEWAN KOMISARIS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKO SULISTYO
2. Jabatan : KOMISARIS PT PLN (PERSERO)
3. NHK : 672633

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 5.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m²/90 m² di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 277 m²/250 m² di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/100 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 345 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m²/250 m² di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m²/400 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 726.000.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 1.5 CVT (CGD) Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VOXY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
4. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 210.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	11.950.666.397
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.250.000.000
Sub Total	Rp.	19.186.666.397
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	19.186.666.397

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.